

MEROKOK TIDAK BISA SEMBARANGAN

KTR Dikombinasikan Penanggulangan Covid-19

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya akan mengkombinasikan kawasan tanpa rokok (KTR) dengan penanggulangan Covid-19. Salah satunya untuk memutus potensi penularan melalui puntung rokok di tempat publik.

Menurut Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, berdasarkan penelitian yang disajikan oleh WHO maupun The Union, perokok aktif memiliki potensi menularkan virus yang lebih tinggi. Terutama bagi perokok yang dalam tubuhnya terdapat virus Korona.

“Perantaranya melalui puntung rokok yang dihisap. Biasanya perokok itu menghisap rokoknya dengan puntung yang menempel di bibir dan basah. Itu bisa menjadi

potensi sumber penularan,” tandasnya, Minggu (6/9).

Selain itu, kegiatan merokok bisa memindahkan virus dari tangan ke mulut. Hal ini karena kebiasaan orang merokok dengan menjepitkan rokoknya dalam dua jari kemudian menempelkannya ke mulut. Padahal jari tangan kerap memegang benda yang mungkin telah terpapar droplet yang mengandung virus.

Oleh karena itu, aturan terkait KTR yang sudah dituangkan melalui Perda 2 Tahun 2017 tentang

Kawasan Tanpa Rokok, akan digencarkan kembali. Dalam aturan tersebut terdapat tujuh lokasi yang diatur yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja serta tempat umum lain yang ditetapkan. Akan tetapi baru tiga lokasi yang diawasi lebih intensif yaitu fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari posyandu hingga rumah sakit, kemudian fasilitas pendidikan sejak dari PAUD hingga perguruan tinggi, serta tempat kerja namun baru khusus di lingkungan Balaikota Yogya.

Heroe mengaku, kawasan Malioboro sebenarnya sudah siap diresmikan sebagai kawasan tanpa

rokok. Hanya, saat hendak diresmikan justru terjadi pandemi Covid-19. “KTR di Malioboro bahkan sudah terbentuk satgas baik dari UPT maupun wilayah. Targetnya waktu itu diresmikan 20 Maret 2020, semua sudah siap namun datang pandemi ini sehingga ditunda,” tandasnya.

Pencanangan KTR yang dikombinasikan dengan penanggulangan Covid-19 pun kini tengah dirumuskan. Perokok aktif kini diimbau menahan diri ketika hendak merokok serta berlaku disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Apalagi adanya protokol baru dari pemerintah yang menuntut kemandirian masyarakat agar semakin tahan dari virus. **(Dhi)-f**

KURIKULUM KONDISI KHUSUS Sekolah Bisa Memilih Sesuai Kebutuhan

YOGYA (KR) - Pembelajaran daring meski tidak bisa menggantikan secara sempurna belajar tatap muka, tapi masih dinilai efektif untuk dilaksanakan saat pandemi Covid-19.

Untuk itu penyesuaian kurikulum perlu dilakukan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Dimana kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus itu memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

“Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Menurut saya kurikulum darurat lebih pas dengan menggunakan istilah penyesuaian kurikulum atau materi mapel. Karena jika diterapkan akan sangat membantu siswa dalam belajar, mengingat beban materi yang dipelajari akan berkurang,” kata pengamat pendidikan dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Dr Y Sri Susilo MSi di Yogyakarta, Minggu (6/9).

Sri Susilo mengungkapkan, selain di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dalam kon-

teks yang sama, penyesuaian kurikulum seharusnya juga diterapkan di Perguruan Tinggi (PT). Apabila kurikulum disesuaikan oleh Kemendikbud maka setidaknya ada standardisasi dari Kurikulum dengan sistem belajar daring. Sehingga memudahkan bagi guru atau dosen dalam memberikan materi mapel atau mata kuliah kepada siswa/mahasiswa.

“Kalau ditanya soal efektif atau tidak. Saya hanya bisa berpendapat kondisi itu akan menjadi lebih baik dan optimal jika sistem belajar daring dilakukan dengan penyesuaian kurikulum atau minimal materi mapel,” ujarnya.

Mantan sekretaris dewan pendidikan Kota Yogyakarta itu menyatakan, semua itu akan bisa dilaksanakan dengan baik, apabila kerja sama semua pihak dapat terus dilakukan. Untuk itu orangtua diharapkan dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Sedangkan guru dapat terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif, dan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan belajar mengajar dengan metode yang paling tepat. **(Ria)-f**

TAK ADA PERPANJANGAN PERMOHONAN 11.801 Wajib Pajak PBB Ajukan Pengurangan

YOGYA (KR) - Kebijakan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditutup 31 Agustus 2020 dan tidak lagi diperpanjang. Selama masa permohonan, Pemkot Yogya menerima 11.801 wajib pajak PBB yang mengajukan pengurangan nilai ketetapan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Wasesa, mengungkapkan pihaknya masih melakukan telaah terhadap berkas yang diajukan oleh wajib pajak PBB. Sehingga jumlah wajib pajak yang dikabulkan dan besaran pengurangannya belum bisa dikalkulasikan secara total.

“Setelah pengajuan permohonan ditutup, kami membutuhkan waktu sepekan untuk telaah,” katanya, Minggu (6/9).

Nilai ketetapan PBB tahun ini sebelumnya menjadi pembahasan pelik di kalangan dewan. Hal ini karena banyaknya aduan dari wajib pajak yang mengalami kenaikan ketetapan hingga beberapa kali lipat dari tahun sebelumnya. Kenaikan ketetapan tersebut lantaran Pemkot melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maupun Zona Nilai Tanah

(ZNT) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kebijakan itu salah satunya merupakan rekomendasi dari KPK karena sudah empat tahun belum pernah disesuaikan. Padahal, merujuk aturan setiap tiga tahun seharusnya ada penyesuaian.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengatakan hasil telaah terhadap permohonan pengurangan ketetapan PBB akan ia tetapkan untuk disetujui. “Sampai saat ini tumpukan berkas di meja saya masih banyak. Tapi pengajuan permohonan memang sudah ditutup. Sekarang tinggal menyelesaikan telaahnya saja,” katanya.

Total ada 95.273 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2020 yang diterbitkan. Heroe memaklumi, banyak wajib pajak yang turut terdampak pandemi Covid-19 sehingga kemampuan finansialnya terganggu. Sehingga meski pengajuan pengurangan ketetapan PBB sudah berakhir, namun intervensi kebijakan akan tetap diberikan. Salah satunya pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melampaui jatuh tempo hingga akhir tahun. **(Dhi)-f**

Muhammadiyah Tak Perlu Lakukan Gerakan Politik

YOGYA (KR) - Dalam merespons keadaan saat situasi gaduh dan konstruksi keadaan serba politis, Nasyiatul Aisyiyah yang merupakan organisasi otonom Muhammadiyah tidak perlu seperti partai politik ataupun gerakan politik. Muhammadiyah termasuk Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah tidak perlu melakukan gerakan politik, mengingat identitasnya tidak disitu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nashir mengemukakan hal tersebut ketika menyampaikan amanat pembukaan Sidang Tanwir 3 Nasyiatul Aisyiyah di Gedung PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro, Minggu (6/9). Sidang Tanwir untuk mengesahkan pengunduran muktamar hingga 2022, diikuti wakil dari 34 provinsi dan dilakukan secara daring. Selain amanat Ketum PP Muhammadiyah, Ketum PP Aisyiyah Siti Noordjanah MM MSi memberikan sambutan dan Ketua Umum PP Nasyiatul Aisyiyah Dyah Puspitarini menyamaikan pidato iftitah.

Agar tidak terpengaruh jalan peradabannya, Muhammadiyah akan melakukan transformasi yakni dari serba reaktif kepada kearifan yang solutif. “Karena itu, sebagai kader perempuan Muhammadiyah dalam keadaan apapun harus memegang prinsip or-



KR-Istimewa

PP Nasyiatul Aisyiyah mendengarkan sambutan Ketum PP Aisyiyah secara daring.

ganisasi dan *khittah* agar bergerak sesuai identitas. Dengan kekuatan ini, *Insya Allah* tidak akan kehilangan peran memecahkan masalah. Yang pasti, jangan sampai sebagai ormas berperilaku seperti parpol atau menjadi gerakan politik,” pesan Haedar.

Muhammadiyah katanya, dalam fase kedua ini mencoba untuk melakukan kontinuitas sejarah berdasarkan keagamaan dengan pikiran baru yang disebut Islam berkemajuan. Dan Islam Berkemajuan inilah menurut Haedar yang menjadi perspektif Muhammadiyah di era abad kedua. Dan di tengah situasi apapun menu-

rutnya, Muhammadiyah akan menghadapi dengan melihat realitas. “Agar tidak terpengaruh, Muhammadiyah akan melakukan transformasi. Perubahan cara dari serba reaktif ke memberi alternative,” tambahnya. **(Fsy)-f**

Sedangkan Siti Noordjanah MM MSi menyatakan bahwa regenerasi dan kaderisasi di Angkatan Muda Muhammadiyah Perempuan menjadi sangat penting dan strategis. Baik di tingkat pusat hingga paling bawah. Karenanya, PP Aisyiyah, lanjutnya, mendukung mundurnya pelaksanaan Muktamar Nasyiatul Aisyiyah hingga 2022. Upaya yang dibutuhkan bukan sekadar pertimbangan periodisasi tetapi lebih untuk kepentingan bangsa dan umat.

“Kaderisasi itu sangat penting. Diharapkan saat Muktamar Aisyiyah tahun 2022 yang akan datang, sudah akan tampil pemimpin yang muda, karena memang era mendentang adalah kepemimpinan muda,” tandasnya. Dengan kebijakan ini, harap Ketum PP Aisyiyah, kepemimpinan lebih visioner sehingga lebih memiliki kekuatan untuk menggerakkan dakwah. **(Fsy)-f**

RALAT PENGUMUMAN LELANG

Menunjuk Pengumuman Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman yang terbit di harian koran Kedaulatan Rakyat hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 perkara No. 35/Pdt.E/2018/PN.Smn perkara antara :
PD. BPR BANK PASAR KULON PRGDO ----- Alamsi Ji, Khudiori No.36 Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo sebagai **PEMOHON EKSEKUSI** /

M e l a w a n

1. **ALI ACHMADI JULYANTO, SE** ----- Beralamat di Merapi Regency Kav. Krakatau 4 Ngebel Gede, 010/034 Sardonharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I,
2. **DYAH ARI SURYANINGTYAS** ----- Beralamat di Merapi Regency Kav. Krakatau 4 Ngebel Gede, 010/034 Sardonharjo, Ngaglik, Sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II,

Tertulis:

Sebidang tanah tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri di atasnya beserta turutannya tanpa kecuali SHM No. 9291 Desa/Kelurahan Condongcatur, NIB :13.04.07.03.02878, Surat Ukur tanggal 07/03/2002 No. 01963/2002, luas tanah 369 m2, diterbitkan tanggal 18 Maret 2002 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas pemegang Hak Ali Achmadi Julyyanto, SE, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Partit - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Sugeng
Alamat : Sanggrahan RT 06 RW 10 Jl. Tembus I

Seharusnya:

Sebidang tanah dan bangunan tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri di atasnya beserta turutannya tanpa kecuali SHM No. 9291 Desa/Kelurahan Condongcatur, NIB :13.04.07.03.02878, Surat Ukur tanggal 07/03/2002 No. 01963/2002, luas tanah 369 m2, diterbitkan tanggal 18 Maret 2002 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman atas pemegang Hak Ali Achmadi Julyyanto, Sarjana Ekonomi, terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kab. Sleman dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Sawah - Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Partit - Sebelah Selatan : Rumah Bp. Sugeng
Alamat : Sanggrahan RT 06 RW 10 Jl. Tembus I

Demikian ralat ini sebagai satu kesatuan tak dapat dipisahkan dengan Pengumuman Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Sleman yang terbit hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020.

Sleman, 07 September 2020

PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
ttd
RIDWAN NURDIN, SH.
NIP. 19681011 199003 1 001

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA LEMBAGA OMBUDSMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2021-2024

Sehubungan dengan akan berakhirnya keanggotaan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti Tahun 2018 – 2021, Tim Seleksi membuka pendaftaran kepada masyarakat untuk menjadi anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti Tahun 2021 – 2024, dengan persyaratan sebagai berikut :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun terhitung sejak pendaftaran.
3. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan ijazah asli.
4. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat Dokter.
5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
6. Daftar Riwayat Hidup.
7. Surat pernyataan bermeterai sanggup bekerja penuh waktu.
8. Surat pernyataan tidak berstatus ASN, Anggota TNI/Polri, tidak menjadi pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai.
9. Surat Pernyataan bermeterai tidak sedang menjadi pengurus/komisioner, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga-lembaga sejenis lainnya.
10. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Seleksi.
11. Membuat karya tulis dengan tema “Peran Lembaga Ombudsman DIY dalam Mengawal Pelayanan Publik dan Etika Bisnis di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” (File Word, Font Time New Roman (12), Spasi 1.5, Minimal 3 halaman maksimal 5 halaman) yang merupakan karya tulis asli (bukan plagiasi).
12. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 berwarna (format jpg).

Catatan:

- ✓ Persyaratan administrasi nomor 1,3,4,5, dan 6 di *scan* dalam bentuk file PDF.
- ✓ Formulir nomor 7, 8, 9, 10 disediakan Tim Seleksi dan dapat diunduh melalui *website* Biro Hukum Setda DIY (<http://birohukum.jogjaprov.go.id/>).
- ✓ Formulir nomor 7, 8, 9, 10 diisi, ditempel materai pada tempat yang disediakan dan di *scan* dalam bentuk PDF.
- ✓ Semua persyaratan administrasi tersebut diatas dikirim dalam satu folder yang diberi judul nama pendaftar ke Tim Seleksi melalui *email pemberkasan.seleksi.lodiy@gmail.com*
- ✓ Pendaftaran dan pemberkasan dibuka pada tanggal 21 September 2020 sampai dengan 29 September 2020. Untuk kemudahan dalam pemberkasan calon peserta seleksi diminta untuk mengirim *email* berkas syarat administrasi ke Tim Seleksi pada hari tersebut dan jam kerja (pukul 08.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB).
- ✓ Email pengiriman syarat administrasi diterima oleh Tim Seleksi paling lambat tanggal 29 September 2020 pada pukul 14.00 WIB.
- ✓ Narahubung (Siwi: 085878206083 dan Dewi: 081804163650).

Yogyakarta, 7 September 2020
a.n. Ketua Tim Seleksi
Sekretaris,

DEWO ISNU BROTO I.S., S.H.

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP. (0274) 540650

PENDIDIKAN POLITIK PERLU DIBERIKAN SEJAK DINI
Jadikan Gedung Dewan dan Balaikota 'Rumah' Rakyat

YOGYA (KR) - Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik dinilai menurun. Padahal politik memiliki peran yang strategis dalam tatanan kenegaraan. Sehingga pendidikan politik pun perlu diberikan sejak dini. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan benar-benar menjadikan gedung dewan maupun balaikota sebagai rumah rakyat.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi SH, menjelaskan lembaga dewan seharusnya bisa menjadi bagian dari edukasi politik bagi kalangan pelajar. “Misalnya dengan merangkul anak-anak sekolah. Siswa SMP negeri yang berprestasi atau ranking 1 hingga 3 diundang ke gedung dewan dan praktek menjadi dewan cilik,” ujarnya.

Sebagai dewan cilik, mereka diajak menggelar sidang paripurna. Ada yang berperan sebagai pimpinan dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi maupun jabatan politis di tingkat eksekutif seperti walikota dan wakil walikota.

Sembari para dewan cilik mempraktekkan sidang paripurna, orangtua yang mengantarkan ditempatkan di ruang terpisah untuk

KR-Ardhi Wahdan

Marwoto Hadi SH

menjalani sarasehan maupun diskusi terkait dunia pendidikan. Dengan begitu edukasi politik bisa diberikan sejak dini dan orangtua juga dapat memberikan masukan dan sumbangsihnya terhadap pendidikan.

“Siswa berprestasi harus mendapat apresiasi. Apalagi sangat jarang mereka yang bercita-cita ingin menjadi politikus, karena ketidak tahuan mereka terhadap politik. Padahal produk hukum di negara kita ini kan produk politik,”

urair Marwoto.

Di samping itu, dari sisi eksekutif, lingkungan balaikota harus difungsikan sebagai rumahnya rakyat. Sehingga fasilitas yang ada di balaikota seharusnya bisa diakses oleh warga. Seperti saat hendak melangsungkan pesta pernikahan, banyak warga yang harus mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk kepentingan sewa gedung, panggung, tenda kursi, soundsystem dan lainnya. Padahal seluruh fasilitas itu sudah tersaji di balaikota.

“Bagi yang menghendaki ruang outdoor, bisa gunakan halaman balaikota. Berikan akses itu kepada warga kota. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa kepala daerah ialah orangtuanya warga kota. Menjadi lebih bagus lagi ketika walikota atau wakil walikota bersedia menjadi saksi pernikahan,” paparnya.

Marwoto menyebut, untuk merealisasikan itu semua membutuhkan persiapan dan keseriusan. Terutama Bagian Umum di lingkungan Pemkot maupun Sekretariat DPRD di lingkungan dewan. Pihaknya pun akan mendukung dari sisi kebutuhan anggaran.

(Dhi)-f